

ABSTRAK

Perkembangan Industri Karung Goni Delanggu 1934 - 1968

Oleh: Riska Fitrianto
11407141036

Klaten merupakan wilayah agraris yang memiliki tanah subur dan didukung oleh proses ekologi yang telah terjadi sejak lama. Daerah Delanggu termasuk salah satu dari wilayah Klaten yang memiliki potensi alam dan letak strategis untuk mengembangkan usaha perkebunan maupun pertanian. Selain pertanian padi, pada abad ke-20 perkebunan tebu, rosela, kapas dan tembakau berkembang pesat di daerah Delanggu. Industri gula serta industri karung goni silih berganti berkembang di Delanggu dari masa Hindia Belanda hingga setelah Indonesia merdeka. Kondisi ekologi dan potensi alam Delanggu berperan penting terhadap kemajuan sosial ekonomi masyarakatnya yang bermatapencarian sebagai petani dan buruh. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang terjadi di Delanggu. Selain itu juga untuk mengetahui perkembangan industri karung goni dan dampak yang ditimbulkan di Klaten pada umumnya maupun di Delanggu pada khususnya.

Dari kajian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa wilayah Delanggu merupakan wilayah subur yang sangat cocok untuk perkebunan maupun pertanian. Hal itu didukung dengan kondisi ekologi dan letak strategis daerah Delanggu. Salah satu hasil perkebunan di Delanggu ialah rosela sebagai bahan baku pembuatan karung goni yang digunakan untuk pengemasan gula, beras, kopi dan lainnya. Perkebunan rosela dan pabrik karung goni yang diusahakan sejak tahun 1934 merupakan usaha dari pemerintah kolonial untuk memaksimalkan potensi ekologi Delanggu. Namun cara-cara kolonial yang masih tetap digunakan dalam mengelola industri karung goni Delanggu telah menimbulkan dampak ekonomi, sosial serta politik terhadap masyarakat Delanggu. Ditambah lagi kebijakan pemerintah Orde Baru yang kurang mendukung perkembangan industri karung goni Delanggu membuat eksistensi karung goni menurun.

Kata Kunci: Industri, Karung Goni, Delanggu.

ABSTRACT

The Development of Gunny Sack Industries in Delanggu in the year of 1934-1968

By: Riska Fitrianto
11407141036

Klaten is an agrarian area which are rich in having fertile soil and is supported by ecology process occurred since long time. Delanggu is one of the areas in Klaten which have natural potential and strategic position to develop any plantations and agriculture. In addition to the rice farming, the sugar cane, roselle, cotton, and tobacco plantations were also grown rapidly in Delanggu in the 20th Century. Sugar and gunny industries were sequentially developed in Delanggu from the Dutch East Indies to the independence of Indonesia eras. The ecological condition and the natural potential of Delanggu play a part in social-economic progress in which the occupations of the citizen were mostly farmers and labors. The aim of this thesis is to reconstruct the historical experiences occurred in Delanggu. Besides, it is to know the gunny sack industries and the impact in Klaten in general and also in Delanggu.

From the investigation, the result shows that Delanggu is a fertile area which is suitable for plantation and agriculture. The result is also supported by the ecological condition and the strategic position of Delanggu. One of Delanggu crops is roselle as the raw material of gunny sacks to pack sugar, rice, coffee, and many others. The roselle plantation and gunny sack industry was afforded since 1934 were an effort of colonial government to maximize Delanggu ecological potentials. Unfortunately, the colonial effort to carry out the gunny sack industry in Delanggu had been proved impacted on economical, social, and political sectors on Delanggu people. In addition, the New Order governmental policies which did not support the gunny sack industries made the decrease of gunny sack existence.

Keyword: Industry, Gunny Sack, Delanggu

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia masa kolonial Belanda selalu ditentukan oleh arah politik pemerintah yang sedang berkuasa. Pada masa itu kebijakan yang diterapkan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan sejalan dengan berkembangnya zaman. Pelaksanaan sistem perkebunan dilakukan melalui penanaman modal, penggunaan teknologi baru, pengelolaan tanah dan tenaga kerja yang tersedia di tanah jajahan. Hal tersebut membuat perkembangan perkebunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari permasalahan tanah dan tenaga kerja yang menjadi unsur pokok dalam setiap usaha perkebunan.

Tahun 1870 merupakan suatu tonggak batas yang sangat penting dalam perkembangan industri di Indonesia.¹ Di tahun 1870 usaha perkebunan di Hindia Belanda mengalami perkembangan pesat setelah diundangkannya *Agrarische Wet*. Dikeluarkannya *Agrarische Wet 1870* adalah momentum penting yang menjadi dasar utama perkembangan perkebunan swasta di Hindia Belanda. Hal tersebut secara nyata berpengaruh dalam meningkatkan jumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Hindia Belanda, khususnya di Tanah Jawa. Dalam waktu singkat puluhan bahkan ratusan pabrik dibangun di Jawa Tengah terutama di wilayah *Vorstenlanden* yang memiliki tanah subur dan banyak penduduknya. Dalam dekade terakhir abad ke-19 dan dua dekade pertama abad ke-20, tanaman perkebunan yang paling penting di daerah *Vorstenlanden* adalah tebu disusul tembakau di tempat kedua.² Tingginya permintaan hasil industri perkebunan yang berorientasi ekspor mendorong pemerintah kolonial membangun pabrik berskala besar untuk mengolah hasil perkebunan, salah satunya adalah pabrik-pabrik gula.

Pada awal abad ke-20, Klaten dan Sragen adalah wilayah Hindia Belanda yang diposisikan sebagai pusat produksi pertanian dan perkebunan. Letak Klaten yang diuntungkan karena berada di antara Surakarta-Yogyakarta dan memiliki tanah subur dijadikan sebagai daerah produktif dengan didirikannya beberapa pabrik gula. Salah satunya didirikan di daerah Delanggu yang memiliki produksi

¹ Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*, (Bandung: ITB, 2000), hlm. 23.

² Takashi, Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 6.

tebu cukup tinggi. Pada mulanya Delanggu ialah sebuah desa di Jawa Tengah yang masuk dalam wilayah Keresidenan Surakarta.³ Saat ini Delanggu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten. Pada 1871 luas perkebunan Delanggu mencapai 404 bau dengan hasil produksinya 16.183 pikul.⁴ Letak geografis Delanggu yang strategis dan ketersediaan tenaga kerja semakin meningkatkan hasil produksi gula di awal abad ke-20. Pada tahun 1930 wilayah Hindia Belanda mengalami masa *malaise* yang menyebabkan perekonomian memburuk. Hal ini mematikan banyak usaha perkebunan di Jawa, terutama produksi gula yang berkembang pesat pada waktu itu. Peristiwa tersebut juga merupakan salah satu penyebab ditutupnya pabrik gula Delanggu dan dialihfungsikan menjadi pabrik karung goni pada tahun 1934. Pembukaan pabrik karung goni Delanggu tidak lepas dari usaha Belanda dalam mengusahakan penanaman rosela untuk tetap memaksimalkan potensi Delanggu.

Pada masa Jepang berkuasa di Hindia Belanda terjadi perubahan orientasi dalam bidang pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produksi padi. Hal itu menyebabkan penurunan produksi karung goni karena lebih mengutamakan padi untuk menyuplai ketersediaan pangan tentara Jepang. Pada perkembangan selanjutnya pabrik karung goni tidak mengalami kemajuan dalam hal apapun, meskipun demikian karung goni tetap sebagai barang penting di masa pendudukan Jepang. Pada masa transisi yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia keadaan politik ekonomi Negara yang tidak menentu semakin menyulitkan industri karung berkembang. Langkah yang dilakukan pemerintah dengan menasionalisasi pabrik karung goni juga tidak dapat mengubah keadaan Delanggu waktu itu. Hal ini membuat Peran karung goni semakin tergantikan dengan penggunaan karung plastik yang dirasa lebih efisien. Selain itu, penanaman tanaman rosela juga tergeser dengan adanya program revolusi hijau yang lebih menguntungkan petani.

³ Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, "Gambaran Kepentingan Politik Kelompok Komunis di Indonesia: Pemogokan Buruh di Delanggu 1948", *Jurnal Socia*, (Vol. 12, 2013), hlm. 176.

⁴ Suhartono, *Perbanditan di Jawa 1850-1942*, (Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1993), hlm. 98.

B. Gambaran Umum Delanggu

Saat ini Kabupaten Klaten termasuk dalam administrasi provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada masa Kolonial Belanda Klaten termasuk dalam wilayah Karesidenan Surakarta. Secara geografis wilayah Kabupaten Klaten terletak di antara 110° 30'-110° 45' Bujur Timur dan 7° 30'-7° 45' Lintang Selatan.⁵ Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah ± 665,56 km² dan terdiri dari 26 kecamatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Klaten merupakan lahan pertanian luas dan memiliki tanah yang subur. Hal ini menjadi alasan yang masuk akal jika banyak perusahaan perkebunan berkembang pesat di wilayah Klaten pada masa kolonial Belanda. Perkembangan pesat tersebut tidak lepas juga dari tersedianya tenaga kerja dan tanah subur luas yang menjadi daya tarik pemilik modal, salah satunya adalah di wilayah Delanggu.

Sampai akhir abad ke-19, Delanggu masih berbentuk suatu desa yang termasuk dalam Karesidenan Surakarta. Hingga tahun 1896 wilayah Delanggu belum tercatat sebagai sebuah *distrik* di *afdeeling* Klaten. Delanggu kemudian berkembang menjadi *onderdistrik* bahkan *distrik* Delanggu yang terdiri dari *onderdistrik* Delanggu, Wonosari, Nrenden dan Kebongede.⁶ Setelah Indonesia merdeka *distrik* Delanggu berubah menjadi suatu daerah kecamatan yang secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten Klaten. Kecamatan Delanggu terdiri dari 16 desa yaitu Sidomulyo, Segaran, Kepanjen, Delanggu, Gatak, Mendak, Krecek, Sabrang, Tlobong, Sribit, Karang, Banaran, Butuhan, Bawon, Jetis dan Dukuh. Kecamatan Delanggu terletak kurang lebih 25-28 kilometer dari puncak gunung Merapi. Jarak tersebut tidak terlalu jauh dari wilayah Delanggu untuk mendapatkan kiriman unsur vulkanik.⁷ Wilayah tersebut juga berada tidak jauh dari mata air Cokro Tulung yang merupakan penyuplai utama air untuk kebutuhan pengairan sawah.

⁵ "Kabupaten Klaten", http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten. Diakses 23 Januari 2016. Pukul 14:00.

⁶ Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, *op.cit.*, *Jurnal Socia*, hlm. 176.

⁷ Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, "Produksi Beras di Delanggu pada Masa Orde Baru 1968-1984", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm. 3.

Jika dilihat dari sarana transportasi, letak Delanggu merupakan wilayah yang sangat strategis. Tahun 1894 jalur lintas Jawa pertama yang menghubungkan Batavia dengan Surabaya melalui Maos, Yogyakarta dan Solo selesai dibangun.⁸ Letak strategis *Afdeeling* Klaten, khususnya *distrik* Delanggu terbukti dengan dibangunnya lima stasiun di daerah Prambanan, Srowot, Klaten, Ceper dan Delanggu. Tujuan utama pembangunan lima stasiun hanya dalam satu *afdeeling* tersebut bertujuan mempermudah dan mempersingkat waktu pengangkutan hasil produksi industri ke pelabuhan di Semarang. Setiap stasiun terhubung langsung dengan pabrik-pabrik besar yang ada di sekitarnya. Semua terintegrasi satu dengan yang lain dengan adanya jalur-jalur lori sebagai sarana transportasi pengangkut hasil perkebunan ke pabrik dan dari pabrik ke stasiun terdekat. Selain itu Delanggu juga dilewati jalan raya utama yang menghubungkan Yogyakarta dengan Surakarta sebagai sarana transportasi utama. Jalan raya utama tersebut membentang dari Yogyakarta hingga Surakarta sepanjang kurang lebih 66 kilometer dan membelah melewati bagian tengah kota Klaten. Letak kota Klaten yang berada tepat diantara Yogyakarta-Solo sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan dan perekonomian di Delanggu. Lokasi Delanggu yang dilalui jalur kereta serta jalan utama Yogyakarta-Surakarta, mempermudah arus distribusi barang hasil produksi maupun perkebunan dari ataupun ke Delanggu.⁹

Kondisi ekologi yang dimiliki daerah Delanggu tidak jauh beda dengan wilayah Klaten pada umumnya, karena masih satu kawasan. Wilayah Kecamatan Delanggu merupakan daerah surplus yang artinya memiliki tanah subur karena didalamnya mengandung adanya material vulkanik. Tanah pertanian Delanggu termasuk tanah regosol kelabu yang mengandung abu dan pasir vulkanik intermedier.¹⁰ Kesuburan tanahnya termasuk dalam ukuran sedang sampai tinggi dan cocok digunakan untuk menanam tanaman pertanian maupun perkebunan. Kondisi ekologi Delanggu yang memadai, mulai dari tanah yang subur serta pengairan yang kaya akan air mineral dijadikan sebagai salah satu wilayah

⁸ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-batas Pembaratan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010), hlm. 139-140.

⁹ Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, *Tesis, op.cit.*, hlm. 30.

¹⁰ Klaten dalam angka 1987, (Klaten: BPS Klaten, 1987), hlm. 3.

perkebunan oleh pemerintah kolonial. Kondisi ekologi tersebut menjadikan pertanian di Delanggu mampu surplus beras. Hal itu juga menjadikan nama Delanggu terkenal sebagai penghasil padi Rojolele yang merupakan padi lokal jenis padi bulu dan telah ditanam secara turun temurun.

Jumlah penduduk di kabupaten Klaten pada tahun 1930 tercatat 573.575 orang dengan kepadatan penduduk sebanyak 981 orang/km².¹¹ Penduduk Klaten termasuk dalam kategori tinggi khususnya di daerah industri seperti Klaten, Ketandan, Wedi, Delanggu, Pedan dan Ceper. Kepadatan penduduk tersebut tidak lepas dari perkembangan industri perkebunan di beberapa daerah di Klaten, salah satunya Delanggu. Jumlah penduduk distrik Delanggu pada akhir tahun 1905 terdapat 44.400 penduduk, termasuk 60 orang Eropa dalam jumlah yang sama penduduk Cina.¹² Jumlah penduduk Eropa yang lebih sedikit daripada penduduk pribumi tersebut tidak menjadikan mereka tertindas dan diremehkan. Sebaliknya, orang-orang Eropa khususnya orang Belanda selalu menempati jabatan tinggi di perusahaan sebagai pemimpin. Posisi orang Belanda berkedudukan sebagai administrator yaitu suatu jabatan yang berada pada puncak pimpinan di dalam perkebunan maupun pabrik di Hindia Belanda. orang Cina menempati posisi dibawahnya yaitu sebagai kontrolir. Sedangkan masyarakat Delanggu sebagai mayoritas berada di jabatan paling rendah yaitu sebagai buruh. Selain itu, mereka hanya dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja di perkebunan sebagai buruh tanam, buruh panen dan buruh angkut serta pekerja di pabrik. Hal tersebut berkaitan erat dengan akibat dari tidak meratanya pribumi yang menikmati fasilitas pendidikan. Sejumlah sekolah rendah didirikan, namun hanya kurang dari 7 persen penduduk pribumi yang tersentuh oleh pendidikan sampai dengan era kemerdekaan.¹³ Karena kurang memiliki keterampilan menjadi wajar jika mereka hanya dijadikan buruh perkebunan dan pekerja pabrik.

¹¹ Enggar Widya asih, “Usaha Tembakau dan Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja di Perkebunan Klaten Jawa Tengah Pada Masa Depresi Ekonomi Tahun 1930-an”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011), hlm. 20.

¹² Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, *Tesis, op.cit.*, hlm. 30.

¹³ A.B. Lopian dkk, *Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 214.

C. Muncul dan Berkembangnya Industri Karung Goni Delanggu

Pada awal abad ke-20 dilakukan pembangunan pabrik-pabrik gula karena gula merupakan produk yang sedang naik daun di pasar internasional. Perkebunan tebu diusahakan hampir di seluruh wilayah pertanian Klaten, salah satunya adalah di wilayah Delanggu. Delanggu mempunyai perkebunan tebu dan menghasilkan panen cukup tinggi untuk dipasok ke daerah Klaten lainnya. Namun hingga awal abad ke-20 Delanggu belum memiliki pabrik gula untuk mengolah sendiri hasil tebu. Sebelum dibangun pabrik gula di Delanggu, hasil perkebunan tebu dipasok ke pabrik-pabrik gula di wilayah Klaten dan sekitarnya. Tahun 1917 pabrik gula Delanggu telah didirikan dan sejak saat itu Delanggu telah melakukan kegiatan produksi sendiri.

Depresi ekonomi yang melanda Hindia Belanda pada tahun 1930 adalah sebuah gejala perekonomian dunia. Bagi wilayah jajahan seperti Hindia Belanda keadaan tersebut berlangsung lebih lama dan menimbulkan akibat yang lebih parah. Akibatnya pemerintah kolonial Belanda mengalami kerugian besar karena penurunan harga dan kelebihan produksi gula. Hal tersebut memaksa pabrik-pabrik gula memulangkan sebagian pekerja dan menurunkan upah untuk menekan biaya produksi. Delanggu sebagai penghasil gula merupakan salah satu daerah di Hindia Belanda yang merasakan imbas dari depresi ekonomi. Keadaan tersebut berdampak cukup parah hingga pada tahun 1933 membuat pabrik gula Delanggu mengalami kebangkrutan sehingga tidak melakukan kegiatan produksi gula lagi dan akhirnya harus ditutup. Ditutupnya pabrik Gula Delanggu membuat lahan perkebunan tebu terbengkalai ditanami rakyat dengan tanaman pangan seperti padi dan kedelai. Selanjutnya, pada tahun 1934 pemerintah memanfaatkan lahan-lahan perkebunan tebu yang terbengkalai dengan membudidayakan tanaman rosela (*Hibiscus Sabdariffa linn*¹⁴) sebagai bahan pembuatan karung goni.

¹⁴ Tanaman rosela memiliki dua varietas, yaitu: a) *Hibiscus Sabdariffa var. Altissima*, rosela berkelopak bunga kuning yang sudah lama dikembangkan untuk diambil serat batangnya sebagai bahan baku pulp dan karung goni. b) *Hibiscus Sabdariffa var. Sabdariffa*, rosela berkelopak bunga merah yang saat ini mulai diminati petani dibudidayakan untuk diambil kelopak bunga dan bijinya sebagai tanaman herbal dan bahan baku minuman kesehatan.

Rosela (*Hibiscus Sabdariffa linn*) yaitu tanaman perdu yang diperkirakan berasal dari India timur, kemudian menyebar secara luas ke daerah tropis dan sub tropis, termasuk di Indonesia. Sejarah pembudidayaan rosela sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 60-70 tahun lalu. Di Indonesia sendiri, tanaman rosela sudah dikenal sejak tahun 1922 dimana rosela telah tumbuh subur disepanjang lintasan kereta api Indramayu, Jawa Barat.¹⁵ Pada saat itu rosela yang memiliki keindahan bunga berwarna merah maupun kuning umumnya digunakan sebagai tanaman hias dalam ruangan ataupun luar ruangan dan sebagai tanaman pagar. Tanaman rosela dapat tumbuh dengan ketinggian hingga mencapai 3-5 meter serta mampu berbunga hampir sepanjang tahun. Bertahun-tahun tanaman rosela hanya dikenal sebagai tanaman hias dan dianggap tanaman tidak berguna pada waktu itu.

Penanaman resmi dimulai pada tahun 1935 oleh perusahaan perkebunan *Maatschappij Mirandole Veote* Semarang. Terdapat beberapa daerah di wilayah Kabupaten Klaten yang menjadi perkebunan rosela antara lain di Kecamatan Delanggu, Polanharjo, Juwiring, Wonosari, Karangnom, Jatinom, Prambanan, Manjung, Gayamprit dan Tulung. Namun dari beberapa daerah tersebut yang paling menguntungkan adalah kecamatan Delanggu.¹⁶ Setelah beberapa tahun membudidayakan tanaman rosela di Delanggu, baru tahun 1938 untuk pertama kalinya perusahaan itu menghasilkan karung goni yang siap dipasarkan.¹⁷ Pada prinsipnya perkebunan-perkebunan di wilayah Delanggu menempati dua macam hak guna tanah. Pertama adalah tanah konversi, yaitu tanah yang pada umumnya ditanami rosela, sedangkan yang kedua merupakan tanah rakyat yang sebagian ditanami kapas dan tembakau.

Bangunan pabrik gula Delanggu yang telah melakukan kegiatan produksi sejak tahun 1917 dan sudah tidak digunakan karena bangkrut di tahun 1933 dialihfungsikan menjadi pabrik karung goni. Alihfungsi bangunan tersebut untuk

¹⁵ “Serat Rosela”, <http://dokuman.tips/documents/tbt-serat-rosela>. Diakses 6 maret 2016, pukul. 20:00 WIB.

¹⁶ Sarjana Sigit Wahyudi, *Ketika Sarbupri Mengguncang Pabrik Karung Delanggu 1948, Sebuah Studi Awal dari Pemberontakan PKI Madiun*, (Semarang: Aini, 2001), hlm. 133.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 118.

memproduksi karung goni dari hasil budidaya tanaman rosela. Pada tahun 1938 pabrik karung goni tersebut untuk pertama kalinya menghasilkan karung goni yang dipasarkan untuk pengemasan gula, kopi, tembakau, kelapa sawit, dan beras. Hingga tahun 1950-an produksi pabrik karung goni Delanggu mencapai 5.545.000 lembar karung goni per tahun.¹⁸ Namun pada tahun 1960-an, khususnya setelah Gerakan 30 September 1965 produksinya mengalami penurunan hanya 2.160.000 lembar karung per tahun. Hal tersebut berdasarkan hitungan produksi tahun 1968 yang mencapai 7.500 lembar karung per hari. Penurunan produksi karung goni dipengaruhi oleh faktor tidak berproduksinya pabrik di tahun 1966-1967 setelah gerakan 30 September 1965.¹⁹

Mengenai pemasaran pabrik karung goni Delanggu memiliki konsumen yang sebagian besar adalah pabrik-pabrik dan perkebunan di wilayah karesidenan Surakarta. Seperti produk karung goni jenis *A Twill's / B Twill's* yang terdapat garis sejajar warna biru, sebagian besar diserap oleh pabrik gula di Keresidenan Surakarta. Pabrik gula yang menggunakan karung goni ialah pabrik yang masih memproduksi setelah *malaise* seperti Pg. Ceper, Pg. Gondang Winangun, Pg. Modjo, Pg. Tasikmadu, Pg. Kalibagor dan Pg. Colomadu. Gudang pengereng tembakau yang sekarang menjadi Perusahaan Perkebunan Nusantara X bertempat di Gayamprit, Wedi dan Kebonarun juga menggunakan kain goni untuk pengemasan tembakau cerutu yang di akan ekspor. Pabrik Karung goni Delanggu juga memproduksi karung goni jenis *HC Green* yang ciri-cirinya terdapat garis sejajar berwarna hijau dipakai untuk mengemas hasil pertanian. Luas lahan yang ditempati pabrik karung goni sekitar 17,7 ha. Terdiri dari bangunan instalasi yang digunakan sebagai landasan mesin-mesin perusahaan seluas ± 4,5 ha.²⁰ Sisanya ± 13,2 Ha digunakan untuk gedung administrasi dan perumahan staf karyawan yang masih berada dalam satu kompleks bangunan instalasi pabrik.

Di dalam kompleks perusahaan dipekerjakan sejumlah 2.800 orang dari 15.567 orang buruh yang terlibat dalam ikatan kerja dengan perusahaan karung

¹⁸ Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, *Jurnal Socia, op.cit.*, hlm. 179.

¹⁹ Wawancara dengan Bpk. Sumardiyono di kantor keamanan bekas pabrik karung goni Delanggu pada 12 November 2016.

²⁰ Sarjana Sigit Wahyudi, *op.cit.*, hlm. 127.

goni Delanggu.²¹ Dari 2.800 orang buruh dapat dibedakan menjadi tiga golongan dari pekerjaannya di dalam perusahaan. Golongan pertama disebut pegawai staf administratif, golongan kedua yaitu sebagai teknisi pabrik dan ketiga golongan pengawas. Perusahaan pabrik karung goni Delanggu pada umumnya memperoleh tenaga kerja dari daerah kabupaten Klaten dan beberapa daerah lain di sekitarnya. Konsentrasi kegiatan usaha di Delanggu menyebabkan sebagian besar tenaga kerja tersebut diambil dari wilayah Delanggu sendiri. Sekitar 80 persen dari karyawan pabrik adalah pria, 15 persennya wanita dan 70 persen dari seluruh karyawan sudah berkeluarga.²²

Kekalahan Belanda atas Jepang membuat seluruh wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan pemerintah Jepang. Akibatnya pada awal tahun 1943 perusahaan pabrik karung goni Delanggu diambil alih oleh pemerintah Jepang dan diusahakan perseroan *Nanio Kahatso*. Pada masa Jepang tersebut, selain digunakan sebagai pembungkus gula dan beras, karung goni juga digunakan sebagai bahan pakaian. Hal tersebut dilakukan rakyat karena pada masa pendudukan Jepang sandang merupakan barang mahal. Pemakaian kain goni untuk bahan pakaian membuat banyak masyarakat terkena penyakit kulit menular karena disebabkan tekstur karung goni yang kasar, berat dan kaku. Perkembangan selanjutnya, pemerintah Jepang kemudian sampai mengeluarkan peraturan tentang pendaftaran karung goni dan larangan menjual, membeli dan memindahkannya.²³ Salah satu isi peraturannya, disebutkan bahwa bagi orang yang memiliki karung goni lebih dari 10 buah, maka ia harus melaporkan dan mendaftarkannya kepada pemerintah lengkap dengan keterangan digunakan untuk apa saja karung goni tersebut. Kebijakan tersebut menunjukkan berharganya karung goni pada masa Jepang.

Pada masa kekuasaan Jepang, perkebunan di Klaten mengalami perubahan orientasi penanaman tanaman pertanian. Sebagian besar lahan yang ditanami tanaman komersial dengan tujuan ekspor dikurangi dan lahan tersebut dijadikan pertanian padi. Tujuannya untuk menyuplai kebutuhan pangan tentara-tentara

²¹ *Ibid.*, hlm. 180.

²² *Ibid.*, hlm. 123.

²³ Kanpo, no 14 tahoen ke II Boelan 3-2603. hlm. 32.

Jepang dalam peperangan yang sedang terjadi saat waktu itu. Peraturan tersebut banyak mempengaruhi produksi pabrik karung goni yang menjadi menurun, karena lahan yang seharusnya untuk menanam rosela ditanami padi. Di masa Jepang, industri karung goni Delanggu tidak mengalami kemajuan karena pemerintah Jepang mengutamakan penanaman padi.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus 1945 menandai berakhirnya kekuasaan pemerintah Belanda maupun pemerintah Jepang. Situasi tersebut membuat kekuasaan pemerintahan diambil alih oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Hal ini menandai dimulainya pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing dengan jalan nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia untuk mengisi kekosongan perekonomian negara. Serangkaian peristiwa dari tahun 1945 hingga akhir tahun 1950, hakikatnya merupakan bagian dari upaya nasionalisasi di segala bidang yang juga diharapkan para buruh. Proses nasionalisasi adalah pengambilalihan berbagai perusahaan milik Belanda maupun milik Jepang di Indonesia. Desakan untuk dilakukannya tindakan pengambilalihan juga dilakukan kepada perusahaan perkebunan rosela dan pabrik karung goni di Delanggu.

Pada tahun 1946 setelah kemerdekaan terbentuk Organisasi buruh terbesar ialah Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Di dalam organisasi ini tergabung 31 serikat buruh dengan 2,5 juta anggota.²⁴ SOBSI memiliki cabang di hampir semua sektor industri dan menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satu cabangnya ialah Sarbupri dan BTI di Delanggu. Pergerakan buruh yang semakin kuat memicu berbagai aksi revolusioner yang menuntut agar pemerintah segera melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda yang masih beroperasi di wilayah Indonesia. Industri karung goni Delanggu kemudian diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya perusahaan tersebut ditangani oleh Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XVII pimpinan Ir. Suwanto. Sedangkan puncak hirarki di pabrik karung goni Delanggu hanyalah seorang administrator yang dijabat oleh Gondowijoyo.²⁵ Pengambilalihan pabrik karung

²⁴ Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 7.

²⁵ Sarjana Sigit Wahyudi, *op.cit.*, hlm. 128.

goni Delanggu yang dilakukan pemerintah tidak diikuti dengan perubahan birokrasi yang lebih baik. keadaan itu membuat kesenjangan sosial antara buruh perkebunan dan pekerja pabrik dengan staf administrasi tetap tidak dapat diredam.

Secara birokrasi dan administrasi pabrik karung goni Delanggu adalah bagian dari perusahaan perkebunan *Maatschappij Mirandole Veote* yang ada di Semarang dan berpusat di Amsterdam, Belanda. Karena perkebunan budidaya rosela dan pabrik karung goni berada di dalam wilayah Klaten, maka diusahakan oleh *Mirandole Veote* cabang Klaten yang lebih dikenal dengan sebutan KCM (*Klatensche Cultuur Maatschappij*). Perkebunan budidaya rosela sebagian besar berada di Delanggu dan sekitarnya. Sedangkan budidaya perkebunan tembakau berpusat di wilayah Wedi, Kebonarum dan Gayamprit. Pengusahaan karung goni dilakukan dengan tujuan memenuhi permintaan kebutuhan karung dari pabrik-pabrik di karesidenan Surakarta untuk pengemasan gula, kopi, tembakau, beras dan hasil perkebunan lainnya. Selain pabrik karung goni Delanggu juga terdapat pabrik karung goni lainnya yang didirikan pemerintah Indonesia setelah merdeka ialah pabrik karung Rosela di Surabaya yang dibangun tahun 1955 dan pabrik karung Pecangaan di Jepara yang didirikan tahun 1968. Peraturan pemerintah No. 14 tanggal 13 April 1968, Ketiga pabrik karung tersebut dikelola oleh PNP XVII yang berpusat di Semarang.²⁶ Beroperasinya tiga pabrik karung goni tersebut memperlihatkan pentingnya kegunaan karung goni sebagai pengemasan hingga pemerintah berkepentingan untuk mendirikan pabrik karung lagi di daerah lain.

Meskipun setelah merdeka perusahaan telah diambilalih oleh pemerintah Indonesia tetapi perbedaan jumlah pendapatan dan fasilitas yang diperoleh para buruh tetap sama. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari gaji pegawai perusahaan staf dengan buruh harian atau buruh kasar dalam perusahaan. setiap tingkat buruh menikmati fasilitas yang berbeda-beda baik dari segi gaji maupun prestis. Jumlah gaji buruh sangat kecil dan tidak teratur dibandingkan dengan gaji pegawai administratif. Bisa dilihat perbedaan tingkat gajinya mencapai 1:10, satu untuk pekerja atau buruh harian dan sepuluh untuk pegawai staf terendah saja, yaitu

²⁶ *Industri Perkebunan Besar di Indonesia: Profil dan Petunjuk*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 1989), hlm. 329.

sinder. Jika dilihat secara nyata hingga tahun 1970, pendapatan buruh pabrik karung goni perbulan sekitar Rp. 30 sampai Rp. 40, sementara untuk karyawan staf terendah gajinya mencapai Rp. 300 sampai Rp. 400.²⁷ Perbedaan fasilitas yang diperoleh kedua kelompok tersebut menunjukkan perbandingan yang mencolok. Golongan pertama menikmati fasilitas jauh lebih baik dan layak bila dibandingkan golongan kedua. Dalam pertemuan pengurus SOBSI tanggal 24 Juni 1948 bahwa para pegawai golongan pertama memperoleh rumah dinas, dapat naik mobil, berpakaian bagus, bersepeda Raleigh yang mengkilat, sedangkan golongan kedua hanya mampu berpakaian karung goni.²⁸

Perkembangan politik di Indonesia setelah merdeka membuka kesempatan bagi para buruh untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka. Kesadaran untuk menjamin kekuatannya maka organisasi-organisasi petani dan buruh perlu menjalin hubungan dengan partai politik yang ada. Sehingga secara politis para karyawan perusahaan karung goni Delanggu terbagi menjadi tiga golongan utama yakni satu bagian yang berafiliasi kepada partai kiri yaitu PKI, satu bagian berafiliasi pada masyumi dan bagian lain berafiliasi pada PNI. Mereka yang berafiliasi pada PKI jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang berafiliasi pada partai lainnya. PKI sebagai kekuatan oposisi dari pemerintah merupakan partai politik yang sangat dekat dengan gerakan kaum buruh menggunakan dalih perjuangan kelas dan membela kepentingan mereka dengan kekuatan sendiri. Organisasi yang sejalan dengan partai kiri antara lain adalah SOBSI, Sarbupri, Perbupri, PKI, dan BTI. Organisasi-organisasi tersebut memperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para buruh. Sedangkan di pihak lain para petani kaya dan pemilik tanah yang tanahnya disewa perkebunan pada umumnya adalah simpatisan partai islam, yaitu murba dan masyumi yang menjadi pendukung pemerintah.

Sedangkan di lain pihak, pemerintah Orde Baru pada waktu itu semakin intensif melaksanakan program-program pertanian yang mengutamakan tanaman pangan. Oleh presiden Soeharto, peningkatan produksi beras menjadi salah satu

²⁷ Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, *Jurnal Socia*, *op.cit.*, hlm. 181.

²⁸ Sarjana Sigit Wahyudi, *op.cit.*, hlm. 41.

tujuan utama dengan program revolusi hijau. Program yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1968 tersebut sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan produksi pertanian.²⁹ Pemerintah melakukan program intensifikasi pertanian dengan banyak mengenalkan varietas padi unggul. Hal ini membuat penanaman rosela semakin menurun karena berkurangnya lahan dan bahkan kurang diminati lagi oleh para petani Delanggu. Hal tersebut terjadi karena hasil padi lebih menguntungkan dibandingkan menanam rosela yang harga jualnya lebih rendah. Selain penanaman rosela yang tergeser dengan penanaman padi varietas baru juga terdapat Rojolele sebagai padi lokal yang juga ikut tergeser.

D. Dampak Bagi Masyarakat Delanggu

Keberadaan ekonomi perkebunan di tengah-tengah ekonomi subsistensi di Jawa secara signifikan telah menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan pada umumnya. Namun, dengan masuknya ekonomi uang membuat keadaan tersebut berubah secara keseluruhan. Dari satu sisi, petani pemilik tanah terpaksa bekerja untuk perkebunan. Hal ini menyebabkan petani tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan lahannya. Semakin berkurangnya lahan untuk tanaman pangan karena disewa perkebunan menyebabkan petani kekurangan penghasilan. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan sebagian besar petani menjadi buruh perkebunan ataupun pekerja pabrik. Pengambilalihan tanah pertanian untuk perkebunan melalui sewa tanah juga mempermudah pemerintah kolonial Belanda maupun perusahaan perkebunan untuk mendapatkan tenaga kerja.

Krisis di wilayah Delanggu tidak berlangsung lama karena tahun 1934 pemerintah Belanda melakukan budidaya tanaman rosela di wilayah Delanggu dan memfungsikan kembali bekas pabrik gula menjadi pabrik karung goni. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan industri karung goni Delanggu dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah Delanggu. Diusahakannya perkebunan rosela dan

²⁹ Yety Rochwulaningsih, Haryono Rinardi, dan Singgih Tri Sulistiyono, *Potret Buram Pedesaan dan Agraria di Indonesia: Tinjauan Sosial Kesejahteraan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, 2008), hlm. 84.

beroperasinya pabrik karung goni 1938 dapat mengurangi jumlah pengangguran setidaknya di wilayah Delanggu sendiri. Beroperasinya pabrik karung membuat perekonomian masyarakat Delanggu kembali membaik setelah peristiwa *malaise*.

Namun berkembangnya perkebunan rosela dan berproduksinya pabrik karung goni Delanggu lebih banyak memberikan dampak positif pada penguasa sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Industri karung goni tersebut membantu pemerintah mengurangi pengeluaran devisa untuk impor karung goni dari negara-negara produsen seperti negara Pakistan dan Bangladesh. Penggunaan karung goni hasil produksi dalam negeri mengurangi ketergantungan karung goni impor dari negara lain. Meskipun ada pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi di sekitar pabrik, tetapi sebenarnya juga berpengaruh negatif kepada masyarakat. Dampak negatif yang dapat dilihat dari upah yang diterima para buruh sangatlah rendah karena tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Adanya perkebunan rosela untuk memenuhi kebutuhan serat pabrik karung goni membuat penanaman padi lokal tergeser dengan penanaman rosela. Hal tersebut karena petani pemilik tanah secara bergiliran harus menyewakan tanah untuk ditanami rosela.

Kondisi sosial masyarakat Delanggu setelah *malaise* dapat dilihat dengan adanya industri karung goni di Delanggu. Adanya industri karung goni Delanggu berdampak besar terhadap sosial masyarakat Delanggu dan sekitarnya. Pengaruh yang terjadi terutama pada hubungan-hubungan kerja di daerah perkebunan rosela dan pabrik karung goni, baik orang per orang, kelompok per kelompok, golongan per golongan. Beroperasinya pabrik karung goni menimbulkan perubahan sosial yang cukup berpengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat sekitar perusahaan karung goni. Salah satu dampak yang terjadi setelah adanya industri karung goni Delanggu kemudian menunjukkan adanya perbedaan kelas antara buruh dengan pegawai administratif pabrik. Sejak pemerintahan kolonial Belanda, masyarakat Delanggu selalu berada dalam urutan kelas sosial paling rendah. Masyarakat Delanggu hanya dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja di perkebunan, mulai sebagai buruh tanam, buruh panen, dan buruh angkut, serta juga sebagai pekerja di pabrik gula. Setelah industri karung goni

Delanggu diambilalih pemerintahan, ternyata nasib buruhnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Perbedaan tingkat pendapatan dan fasilitas yang diperoleh para buruh sangat mencolok, terutama antara pegawai staf dengan buruh. Kelemahan-kelemahan dalam bidang sosial ekonomi tersebut kemudian dieksploitasi dan dijadikan landasan partai politik memobilisasi buruh dalam melakukan aksi pemogokan untuk menuntut kesejahteraan. Kemerdekaan bangsa menjadikan perlawanan terhadap imperialisme Barat dalam arti fisik tidak lagi relevan untuk dipikirkan secara nasional. Pemikiran kaum kiri lebih terarah pada membongkar ketidakadilan struktural yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Kemiskinan masyarakat Karesidenan Surakarta menjadi potensi yang mampu menumbuhkembangkan gerakan kiri pada masa kemerdekaan. Pergerakan para buruh yang semakin kuat memunculkan berbagai aksi revolusioner yang menuntut pemerintah agar segera melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda yang masih beroperasi di Indonesia. Desakan pengambilalihan tersebut juga dilakukan untuk perusahaan perkebunan rosela dan pabrik karung goni di Delanggu. Hal tersebut tercermin dengan adanya Gerakan Anti Swapraja tahun 1946 di Surakarta dan pemogokan buruh karung goni di Delanggu tahun 1948.

E. Kesimpulan

Klaten merupakan wilayah agraris yang memiliki tanah subur dan luas. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dengan jenis tanah yang cocok untuk usaha pertanian maupun perkebunan. Selain gula dan tembakau, di *Afdeling* Klaten juga terdapat beberapa perkebunan lain seperti kakao, indigo, serat, dan lainnya. *Distrik* Delanggu termasuk salah satu wilayah di *Afdeling* Klaten yang memiliki tanah subur dan potensi alam untuk mengembangkan usaha pertanian maupun perkebunan. *Distrik* Delanggu memiliki unsur-unsur penting seperti tanah yang luas, pengairan melimpah sepanjang tahun, iklim yang baik, letak wilayah strategis, tenaga kerja tersedia dan akses transportasi utama yang mudah. Hal ini menjadi latar belakang perkembangan Delanggu dari sebuah desa kemudian berkembang menjadi *onderdistrik* bahkan hingga menjadi salah satu *distrik* di *Afdeling* Klaten.

Industri karung goni di Delanggu mulai diusahakan pemerintah Belanda setelah terjadinya *malaise* tahun 1930 untuk tetap memanfaatkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Pada tahun 1934 pemerintah kolonial Belanda mulai membudidayakan tanaman rosela di bekas lahan perkebunan tebu. Pada tahun 1938 pabrik karung goni yang merupakan alihfungsi dari pabrik gula untuk pertama kalinya menghasilkan karung goni yang siap dipasarkan. Perkembangan industri karung goni Delanggu telah melalui beberapa pergantian kekuasaan pemerintahan dari masa kependudukan kolonial Belanda, masa kependudukan Jepang, masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Orde Lama hingga Orde Baru. Namun kebijakan yang dikeluarkan setiap pergantian kekuasaan pemerintahan tidak pernah memihak kepada petani maupun buruh. Kebijakan upah buruh dan penyewaan tanah selalu merugikan rakyat, sedangkan keuntungannya hanya dirasakan golongan tertentu saja.

Cara-cara kolonial yang masih digunakan lebih banyak menimbulkan dampak-dampak negatif bagi masyarakat. Keadaan sosial dan ekonomi negara serta rakyat Delanggu yang belum stabil dimanfaatkan oleh beberapa golongan untuk mencapai kepentingan politiknya. Keadaan tersebut menimbulkan dampak yang lebih buruk dan hanya menghambat perkembangan industri karung goni yang ada di Delanggu. Setelah diambalihnya perusahaan karung goni oleh pemerintah Indonesia hingga tahun 1968, perkembangan industri karung goni di Delanggu tidak banyak mengalami kemajuan. Penurunan produksi dan kemunduran perusahaan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya peran serta dukungan pemerintah dalam memajukan industri karung goni Delanggu dan manajemen perusahaan yang masih menggunakan cara-cara kolonial tanpa adanya inovasi. Ditambah lagi dengan dampak politik nasional setelah tahun 1965 yang memaksa perusahaan berhenti beroperasi selama \pm 2 tahun serta dilakukannya perombakan pengawai secara besar-besaran yang mengharuskan perusahaan karung goni Delanggu memulai semua dari awal.

Daftar Pustaka

Arsip:

Arsip Laporan Tahunan PNP XVI (Koleksi Perpustakaan Museum Gula Gondang Winangun), tentang pembelian karung goni tahun 1969.

Arsip Denah Lokasi Luas Lahan Pabrik Karung Goni Delanggu (Koleksi Kantor Kelurahan Delanggu), Klaten: Kelurahan Delanggu.

Buku dan Artikel

Bondan Kanunmoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*, Bandung: ITB, 2000.

Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, "Gambaran Kepentingan Politik Kelompok Komunis di Indonesia: Pemogokan Buruh di Delanggu 1948", *Jurnal Socia*, Vol. 12, Yogyakarta: UNY, 2013.

Industri Perkebunan Besar di Indonesia: Profil dan Petunjuk, Jakarta: Departemen Pertanian, 1989.

Kanpo, no 14 tahun ke II Boelan 3-2603.

Kantor Desa Delanggu, *Mengenal, Desa: Delanggu, Kecamatan: Delanggu, Delanggu: Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Provinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah*, 1980.

Kantor Statistik Kabupaten, *Klaten dalam Angka Tahun 1987*, Klaten, Bappeda Dati II Klaten, 1988.

Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-batas Pembaratan*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010.

Mubyarto, dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Roll, Werner, *Struktur Pemilikan Tanah, Studi Kasus Daerah Surakarta-Jateng*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Sarjana Sigit Wahyudi, *Ketika Sarbupri Mengguncang Pabrik Karung Delanggu 1948, Sebuah Studi Awal dari Pemberontakan PKI Madiun*, Semarang: Aini, 2001.

Soegijanto, Padmo, *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, Yogyakarta: Penerbitan Media Presindo dan KPA, 2000.

Shiraishi, Takashi, *ZAMAN BERGERAK: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Suhartono, *Apanage dan Bekel, perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

_____, *Perbanditan di Jawa 1850-1942*, Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1993.

Yety Rochwulaningsih, Haryono Rinardi. dan Singgih Tri Sulistiyono, *Potret Buram Pedesaan dan Agraria di Indonesia: Tinjauan Sosial Kesejahteraan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, 2008.

Skripsi

Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, “*Produksi Beras di Delanggu Pada Masa Orde Baru 1968-1984*”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013.

Enggar Widya Asih, “*Usaha Tembakau dan Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja di Perkebunan Klaten Jawa Tengah pada Masa Depresi Ekonomi Tahun 1930-an*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011.

Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten, diakses 23 Januari 2016.

<http://dokuman.tips/documents/tbt-serat-rosela>, diakses 6 maret 2016.